

Edisi:

#01

**Desember,
2015**

PENGANGGARAN HIJAU NEWSLETTER

**Menginternalisasikan aspek lingkungan
ke dalam proses penganggaran.**

Tentang Edisi Ini

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bersama Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Presiden Yudhoyono mendeklarasikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen dari skenario *business as usual* (BAU) pada 2020 secara mandiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional. Salah satu upaya untuk merealisasikan komitmen verbal tersebut, presiden Yudhoyono menandatangani peraturan presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Kemudian, disepanjang tahun 2011 hingga 2013, banyak pemerintah provinsi mengadopsi peraturan tersebut dan mengedarkan peraturan gubernur terkait hal yang sama, namun dalam skala daerah yang disebut Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Pemerintah kala itu, baik pusat maupun daerah, menyadari bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam memimpin rakyat Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu instrumen yang digunakan

pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang komposisinya memenuhi asas pembangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial (Energyprofessional, 2009). Proses pemasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam anggaran pemerintah ini disebut penganggaran hijau (*green budgeting*).

LPEM FEB UI dan MCAI menyusun rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendorong efektivitas pengimplementasian penganggaran hijau dalam mencapai tujuannya. Berbagai kegiatan telah dan akan dilakukan. *Newsletter* ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan perkembangan kegiatan tersebut. Pada edisi ini akan disampaikan gambaran umum rangkaian kegiatan dan beberapa temuan awal dari studi yang telah dilaksanakan.

Selamat Membaca.

Laporan Kegiatan

Cakupan Kegiatan

Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia yang disebabkan perubahan lahan dan deforestasi. Untuk mendukung pencapaian komitmen pengurangan emisi GRK—yang belakangan ditingkatkan oleh Presiden Jokowi menjadi 29% dengan usaha sendiri—penguatan institusi sangatlah penting. Aktor di tingkat daerah, seperti pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat di kota dan di desa, perlu berperan lebih aktif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan penganggaran hijau (*green budgeting*).

Sayangnya, sampai saat ini penganggaran hijau di Indonesia masih terbatas. Menyadari pentingnya implementasi penganggaran hijau, khususnya di pemerintah lokal, LPEM FEB UI bekerja sama dengan Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melakukan kegiatan Pengetahuan Hijau, dengan tajuk “*Mendukung dan Melanjutkan Perencanaan Mitigasi Karbon Indonesia melalui Penganggaran Hijau: Memperluas Pengetahuan dan Mengimplementasikannya di Pemerintah Lokal.*”

Kegiatan LPEM FEB UI terdiri dari empat bagian utama. Pertama, melakukan penelitian dengan cara: a) mencari tahu terbaik penganggaran hijau di negara atau daerah lain; b) mensurvei pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengetahui partisipasi mereka dalam penganggaran hijau; c) meninjau ulang anggaran pemerintah di tingkat lokal; d) membangun indikator untuk mengukur efektifitas program atau kegiatan yang dianggarkan sebagai bagian strategi pembangunan rendah karbon; e) menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja berdasarkan perspektif penganggaran hijau.

Kedua, memberikan *capacity building* untuk pemerintah pusat dan daerah tentang penganggaran dan perencanaan keuangan daerah yang berperspektif penganggaran hijau. Hal ini dilakukan dengan membuat buku manual, memberikan *Training for Trainers*, dan *technical assistance* untuk kelompok pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten target.

Ketiga, memanfaatkan kerja sama yang sudah ada dan membangun kerja sama baru dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang relevan untuk meningkatkan implementasi penganggaran hijau melalui penandatanganan kesepakatan dan forum pemangku amanah. Keempat, memperluas partisipasi kegiatan *capacity building* dan menyebarkan hasil penelitian melalui seminar publik dan forum akademik.

Rangkaian kegiatan ini akan dilakukan di empat provinsi di Indonesia, yaitu: a) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan empat kabupatennya (Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat, and Sumba Timur); b) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tiga kabupatennya (Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara); c) Jambi dan empat kabupatennya (Muaro Jambi, Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur); 4) Sulawesi Barat dan dua kabupatennya (Mamuju dan Mamasa). Kegiatan ini berlangsung dari Juli 2015 sampai Februari 2018.

Secara ringkas, kegiatan LPEM FEB UI dijelaskan pada **Gambar 1**.

Progress Report

Hingga tulisan ini diturunkan, tim LPEM FEB UI telah melakukan rangkaian awal penelitian, berupa studi literatur serta survei lapangan (*in-depth interview* kepada *stakeholder*), dan *Multi-stakeholder Forum* (MSF). MSF, yang telah dilaksanakan dua kali, secara umum dilakukan untuk membangun kerjasama antar pemangku kepentingan penganggaran hijau.

MSF 1

MSF pertama dilakukan pada tanggal 10 November 2015 di Mercure Hotel, Jakarta. MSF kali ini memiliki tujuan khusus untuk berbagi pendapat mengenai masalah yang dihadapi dalam implementasi penganggaran hijau di Indonesia. Informasi ini bermanfaat guna melengkapi studi literatur serta mendapatkan sudut pandang pemangku kepentingan. Forum ini dihadiri oleh 20 orang yang berasal dari berbagai lembaga dan badan terkait, termasuk LPEM FEB UI dan MCAI, seperti: Sekretariat RAN-GRK/Bappenas, BKF, Paramadina Public Policy Institute, Article 33 dan KPPOD.

Di dalam forum, pihak BKF-Kementerian Keuangan mengklaim telah menerapkan konsep *green budgeting* dalam penyusunan APBN dan hal tersebut merupakan salah satu indikasi keberpihakan pemerintah pusat pada pembangunan ekonomi hijau. Sebagai salah satu contoh: pengurangan subsidi di bidang energi (BBM dan listrik) yang kemudian dialihkan ke kegiatan produktif yang berpihak pada ekonomi hijau. Selain itu, berdasarkan fungsi APBN-P 2015, telah tersedia anggaran untuk lingkungan hidup sekitar Rp 11,9 triliun atau naik sekitar 10% dari APBN 2015. Namun, hal ini juga dinilai kurang karena adanya keterbatasan ruang gerak fiskal akibat pos-pos pengeluaran yang bersifat mandatori.

Meskipun begitu, seperti diungkapkan partisipan lainnya, implementasi penganggaran hijau, terutama ditingkat daerah, masih belum efektif karena berbagai masalah yang

**GAMBAR 1
KERANGKA KEGIATAN**



menghambat. Misalnya, ada ketidakjelasan detail belanja dalam penganggaran RAD-GRK di provinsi, yang mana dana untuk seluruh pos kegiatan di-*bundling* menjadi satu kesatuan.

Pengukuran emisi yang hanya berdasarkan satuan ton CO₂ ekuivalen juga dinilai menjadi masalah oleh beberapa peserta forum karena dinilai kurang informatif. “Idealnya,” menurut salah satu peserta forum, “ada indikator lain yang dapat memberikan informasi secara kualitatif, misalnya, untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.” Ditambah lagi, tidak sinkronnya data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi kendala.

Keberlanjutan pelaksanaan program juga menjadi sorotan. Salah satu peserta forum menyampaikan bahwa, “Selama ini, ada kepala daerah yang punya komitmen melaksanakan program yang mendukung pencapaian RAD-GRK, tetapi ketika masa jabatan kepala daerah tersebut berakhir, komitmen tersebut tidak dilanjutkan oleh kepala daerah selanjutnya.”

Survei Lapangan

Tim LPEM FEB UI telah mengunjungi keempat provinsi dan kabupaten-kabupaten terpilih untuk menyelidiki peran berbagai lembaga daerah dalam penganggaran hijau, seperti: Bappeda, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP), Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. Survei lapangan dilakukan sepanjang bulan November hingga Desember 2015.

Selain untuk melakukan wawancara kepada narasumber, survei lapangan juga dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penganggaran hijau, seperti RPJMD Provinsi

hingga Renja SKPD di setiap instansi terkait.

Sebelas pertanyaan terstruktur ditanyakan kepada setiap narasumber, yang berpusat pada tiga topik besar: perencanaan, implementasi dan evaluasi dari penganggaran hijau. Pada topik pertama, dua informasi penting ditanyakan terkait aktor utama dan dokumen yang menjadi sumber RAD dalam perencanaan; pada topik kedua, informasi terkait kendala perhitungan BAU, implementasi program dan sumber pembiayaan program ditanyakan; sedangkan pada topik ketiga, tim menanyakan tentang indikator efektivitas pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan. Secara umum, kondisi yang saat ini berlaku, untuk ketiga aspek tersebut, relatif sama. Hasil selengkapnya dapat dilihat di **tabel 1**.

MSF 2

Berbekal hasil studi literatur dan hasil *indepth-interview* dengan beberapa pemangku kepentingan di empat provinsi terpilih (NTT, NTB, Jambi dan Sulawesi Barat), LPEM FEB UI mengadakan MSF kedua di masing-masing provinsi tersebut. Forum kedua yang dilaksanakan di bulan Desember 2015, bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil temuan sementara dan mencari masukan mengenai isu-isu terkait implementasi *green budgeting* di daerah.

MSF 2 yang dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya, memunculkan poin-poin terkait implementasi RAD GRK di provinsi tersebut. Menurut salah satu peserta yang terafiliasi dengan Bappeda Provinsi NTB, ada 6 SKPD yang bertanggung jawab terhadap RAD GRK, yakni: SKPD berbasis lahan (Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perkebunan), SKPD berbasis energi dan transportasi (Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Perhubungan), serta SKPD

TABEL 1
TEMUAN UMUM DI EMPAT PROVINSI

		JAMBI	NTB	NTT	SULBAR
PERENCANAAN	1. Aktor Utama	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda; dibentuk tim Kelompok Kerja
	2. Dokumen Sumber RAD	RPJMD	RPJMD	Renstra, karena RPJM belum ada	RPJMD dan juga disesuaikan dengan prioritas visi-misi gubernur
IMPLEMENTASI	1. Kendala Perhitungan BAU	Metode berubah-ubah, SDM berganti	Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD-GRK sehingga perlu melibatkan tenaga ahli	Metode berubah-ubah, SDM berganti	1) Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD-GRK 2) Kekurangan alat/sarana untuk menghitung realisasi emisi di lapangan 3) Sistem rotasi pegawai terhadap SDM
	2. Implementasi Pelaksanaan Kegiatan	Aksi mitigasi dalam RAD, disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra)	Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD. RPJMD menjadi	Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD tapi terkait perubahan iklim.	Aksi mitigasi dalam RAD disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra) sepanjang masih dalam batasan RPJMD dan visi-misi gubernur.
	3. Sumber Pembiayaan	APBD 1	APBD dan DAK (APBN), disesuaikan dengan	APBD selama masuk RPJMD, juga dari Dana Dekonsentrasi	Menggunakan dana yang berasal dari APBD dan APBN (dalam bentuk DAK dan dana Dekon/TP)
EVALUASI	1. Indikator Efektivitas Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi Kegiatan perubahan iklim dikaitkan dengan Renstra/RKPD, sesuai dengan LAKIP 	Belum ada khusus untuk indikator perubahan iklim. RPJMD dan LAKIP menjadi acuan.	Indikator pelaksanaan kegiatan dalam RPJMD dan belum ada khusus untuk indikator perubahan	Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi
	2. Koordinasi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Minimal setahun dua kali Awal tahun penentuan target Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target Koordinasi informal (hubungan personal antar 	Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD	Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD	<ul style="list-style-type: none"> Awal tahun untuk penentuan target, penentuan program dan pelaksanaan program (Pemprov atau Pemkab) Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target

berbasis limbah (Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum). Seluruh SKPD harus membuat laporan kepada Bappeda.

Evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun, di tengah tahun dan di akhir tahun. Dalam tahapan ini, diakui terdapat kesulitan dalam pengumpulan data dari SKPD di kabupaten karena mungkin kurangnya pemahaman terhadap RAD-GRK itu sendiri.

Kurangnya pemahaman ditingkat kabupaten/kota juga dibenarkan oleh beberapa peserta MSF lainnya. "Pengalaman di lapangan," ungkap salah satu peserta dari P2KP, "menunjukkan bahwa pegawai setingkat kepala bidang dan sekretaris bidang saja tidak atau belum paham tentang RAD-

GRK ini." Alhasil, forum sepakat bahwa diperlukan sebuah *workshop* untuk menyebarkan pengetahuan terkait pengurangan hijau.

Selain itu, kesulitan juga ditemukan dalam proses perhitungan BAU *baseline*. "Masih belum ada SDM yang memadai, disamping juga masalah konstrain waktu." Karenanya, Bappeda harus merekrut beberapa tenaga ahli dari Universitas Mataram.

Menanggapi permasalahan pengetahuan yang masih minim, salah satu perwakilan MCAI mengungkapkan akan diadakan rapat koordinasi teknis terkait yang akan dilakukan bersama LPEM FEB UI. "Hal ini bisa menjadi salah satu pintu bagi kabupaten untuk lebih mengetahui apa itu RAD-GRK."



Contact Person:
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat.
Telp: (021) 314-3177 Fax. (021) 319-343-10
Email: penganggarranhijau@lpem-feui.org | riatu.mariatul@ui.ac.id

Tim Peneliti:
Riatu M. Qibtiyyah, Cita Wigjoseptina, Devina Anindita, Farma Mangunsong, Ledi Trialdi, Lili Yunita, Nia Kurnia, Sulistiadi Dono Iskandar, Yusuf Sofiyandi Simbolon

Desain:
Bayu Tegar Perkasa